

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERHUBUNGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	3
<b>PENDAHULUAN</b>	3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
<b>BAB II</b>	7
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	7
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	7
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
<b>BAB III</b>	11
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	11
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	12
Pendapatan - LO	13
Beban	13
Aset	14
Kewajiban	23
Ekuitas Dana	25
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD sebagai berikut :	25
<b>BAB IV</b>	27
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	27
<b>BAB V</b>	29
<b>PENUTUP</b>	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perhubungan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON  
KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD:

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>15.514.787.600,00</b>	<b>15.298.929.389,00</b>	<b>98,61</b>
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.512.010.000,00	1.493.778.250,00	98,79
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	196.700.000,00	98,35
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	11.913.148.000,00	11.762.531.325,00	98,74
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	254.360.800,00	248.618.302,00	97,74
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	20.000.000,00	19.595.200,00	97,98
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	272.592.000,00	254.258.408,00	93,27
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	186.360.400,00	180.408.312,00	96,81
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	359.087.600,00	356.145.551,00	99,18

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	369.960.800,00	366.762.381,00	99,14
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	302.268.000,00	295.131.660,00	97,64
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.692.515.356,00</b>	<b>5.588.736.626,00</b>	<b>98,18</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.840.889.356,00	4.794.329.156,00	99,04
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,00	17.496.600,00	99,98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	72.081.000,00	90,10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.586.000,00	79.107.000,00	82,76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.487.500,00	98,29
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.939.600,00	98,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	65.606.225,00	82,01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.540.000,00	385.161.225,00	95,92



No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	73.538.320,00	98,05
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.990.000,00	99,98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>21.207.302.956,00</b>	<b>20.887.666.015,00</b>	<b>98,49</b>

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan:

No	Sub Kegiatan	Hambatan dan Kendala
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nihil
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nihil
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Nihil
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Nihil
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Nihil
6	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Nihil
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Nihil
8	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nihil
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nihil
10	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Nihil
11	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nihil

No	Sub Kegiatan	Hambatan dan Kendala
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nihil
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nihil
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nihil
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nihil
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nihil
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nihil
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nihil
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nihil
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nihil
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nihil
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nihil
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nihil

Secara umum dalam pencapaian target kinerja kegiatan tidak mengalami hambatan dan kendala.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan SKPD

1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum
2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023:

No	Nama Akun	Tahun Anggaran 2022		Tahun Anggaran 2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 1.255.000.000	Rp. 1.256.417.500	Rp. 1.280.000.000	Rp. 1.302.021.350
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 210.000.000	Rp. 210.652.200	Rp. 210.000.000	Rp. 222.924.000
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp. 12.200.000	Rp. 12.300.000	Rp. 24.200.000	Rp. 28.530.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 5.000.000	Rp. 25.945.950	Rp. 17.000.000	Rp. 21.539.850
		Rp. 1.482.200.000	Rp. 1.505.315.650	Rp. 1.531.200.000	Rp. 1.575.015.200

Menurut Berita Acara Nomor 5/900/I/2023 pada 23 Januari 2023 terdapat pelimpahan pendapatan atas retribusi izin trayek dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Sehingga, realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.575.015.200,- atau 102,86% dari anggarannya sebesar Rp.1.531.200.000,-

Realisasi Pendapatan tersebut diatas adalah merupakan pendapatan dari 6 jenis retribusi yaitu Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pegujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Parkir Khusus, dan Izin Trayek serta Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Se – Kabupaten Temanggung dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan SKPD:

1. Pendapatan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
2. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Pendapatan Retribusi Terminal
4. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Pendapatan Retribusi Izin Trayek
6. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Akun	Tahun Anggaran 2022		Tahun Anggaran 2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp. 675.000.000	Rp. 675.635.000	Rp. 700.000.000	Rp. 717.285.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 580.000.000	Rp. 580.782.500	Rp. 580.000.000	Rp. 584.736.350
3	Retribusi Terminal	Rp. 160.000.000	Rp. 185.102.200	Rp. 185.000.000	Rp. 190.074.000
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 25.000.000	Rp. 25.550.000	Rp. 25.000.000	Rp. 32.850.000
5	Retribusi Izin Trayek	Rp. 12.200.000	Rp. 12.300.000	Rp. 24.200.000	Rp. 28.530.000
6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 5.000.000	Rp. 25.945.950	Rp. 17.000.000	Rp. 21.539.850
		Rp. 1.448.588.800	Rp. 1.472.003.100	Rp. 1.531.200.000	Rp. 1.575.015.200

3.1.2. Belanja

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi :

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2023 sebesar **Rp4.798.299.156,-** atau sebesar **99,03%** dari anggaran sebesar **Rp4.845.159.356,-**

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2023 sebesar **Rp14.966.488.859,-** atau sebesar **98,30%** dari anggaran sebesar **Rp15.224.713.600,-**

3.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2023 sebesar **Rp1.122.878.000,-** atau sebesar **98,72%** dari anggaran sebesar **Rp1.137.430.000,-**

3.1.3. Pendapatan - LO

3.1.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO sebesar Rp1.567.782.156,- yang terdiri dari :

- |  |     |                |
|--|-----|----------------|
| 1. Retribusi Parkir di tepi jalan umum                             | Rp. | 717.285.000,00 |
| 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                          | Rp. | 580.541.933,00 |
| 3. Retribusi Terminal  | Rp. | 190.074.000,00 |
| 4. Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                  | Rp. | 32.850.000,00  |
| 5. Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum | Rp. | 25.491.373,00  |
| 6. Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor         | Rp. | 21.539.850,00  |

3.1.4. Beban

3.1.4.1 Beban

Beban Daerah terdiri dari Beban Operasi dan Defisit Non Operasional dengan nilai total sebesar **Rp19.360.012.546,-** yang terinci sebagai berikut:

Beban operasi sebesar Rp19.360.012.546,- yang terdiri dari :

1.	Beban Pegawai	Rp	4.887.539.718
2.	Beban Barang dan Jasa	Rp	14.544.963.828
3.	Beban Penyisihan Piutang	Rp	119.000

3.1.5. Aset

3.1.5.1 Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2023:

No	Kas dan Setara Kas	TA. 2022	TA. 2023
a	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. -	Rp. -
b	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. -	Rp. -
		Rp. -	Rp. -

Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 0,-

3.1.5.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-

3.1.5.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-

3.1.5.4 Piutang

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp534.261.500,- yang terdiri dari:

- Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp415.401.300,-
- Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp118.860.200,-

Sedangkan penyisihan piutang senilai Rp534.261.500,-. Upaya tindak lanjut terkait penyelesaian piutang pada tahun 2023 adalah pengusulan untuk penghapusan piutang.

### 3.1.5.5 Persediaan

Persediaan barang yang masih berada di Dinas Perhubungan sebesar Rp691.368.298,- dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Sisa Bulan Ini		
		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
1	Begel,sengkang/besi strip	7	518.200,00	3.627.400,00
2	Pipa Hitam	23	160.000,00	3.680.000,00
3	Pipa GI DN 2 "	18	1.150.000,00	20.700.000,00
4	Tiang Besi FO	4	5.250.000,00	21.000.000,00
	Tiang Besi FO	4	5.700.000,00	22.800.000,00
5	Blangko Kendali Surat Masuk	3	10.000,00	30.000,00
6	Tanda Bukti Pengeluaran (kwitansi dinas )	3	35.000,00	105.000,00
7	karcis parkir	4	47.500,00	190.000,00
	karcis parkir	1.800	2.400,00	4.320.000,00
8	karcis retribusi terminal	773	3.250,00	2.512.250,00
9	laporan pendapatan uang retribusi terminal	896	2.400,00	2.150.400,00
10	belanja cetak tanda bukti lulus uji berkala (PNBP)	3	33.000,00	99.000,00
11	stopmap dinas	4.244	25.000,00	106.100.000,00
12	SKRD ½ folio	100	10.000,00	1.000.000,00

No.	Nama Barang	Sisa Bulan Ini		
		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
13	Kabel NYA	12	35.000,00	420.000,00
14	Kabel LVTC	20	11.500,00	230.000,00
	Kabel LVTC	400	18.426,00	7.370.400,00
15	Kabel Senur	2.500	18.500,00	46.250.000,00
16	lampu LED Bulp E27 20 watt warm white	30	14.985,00	449.550,00
17	Lampu LED Bulp E27 30 watt warm white	12	136.419,00	1.637.028,00
18	Lampu sorot LED 50 watt	10	186.480,00	1.864.800,00
19	Lampu Hias	7	584.970,00	4.094.790,00
20	Lampu PJU LED 120 watt smart	13	64.380,00	836.940,00
21	Lampu PJU LED 60 watt	2	4.500.000,00	9.000.000,00
22	Lampu Selang, skyled	47	4.060.000,00	190.820.000,00
23	Lampu LED 40 watt	1	1.814.850,00	1.814.850,00
24	Lampu Solar Panel	167	1.200.000,00	200.400.000,00
25	MCB 10 A, schneider	5	2.800.000,00	14.000.000,00
26	MCB 4 A	8	88.966,50	711.732,00
27	MCB 6 A	12	81.307,50	975.690,00
28	Timer Digital	3	88.800,00	266.400,00



No.	Nama Barang	Sisa Bulan Ini		
		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
29	Alkua, SNI	14	770.000,00	10.780.000,00
30	Stoping Buckle	12	20.979,00	251.748,00
31	Besi arde	30	5.445,00	163.350,00
32	Isolasi Listrik	15	38.115,00	571.725,00
	Isolasi Listrik	1	7.500,00	7.500,00
	Isolasi Listrik	6	18.000,00	108.000,00
33	Kap Lampu Jalan/Kap Hijau	1	27.000,00	27.000,00
34	Kontaktor 35 A - S-N35/S-T 35	10	29.970,00	299.700,00
35	Link	2	518.925,00	1.037.850,00
36	Kontraktor S - N35	85	3.267,00	277.695,00
37	Fotocell	10	688.750,00	6.887.500,00
<b>Jumlah</b>				<b>691.368.298,00</b>

### 3.1.5.6 Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

### 3.1.5.7 Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Kode	Nama Bidang Barang	Nilai Aset	Mutasi										Nilai Aset per 31 Desember 2023
		Neraca Awal 2023	Bertambah					Berkurang					Jumlah Harga (Rp)
		Jumlah Harga (Rp)	Belanja Modal	BOP	Dropping / Antar OPD	Bukan Belanja Modal	Jumlah Bertambah	Tidak Masuk Aset (Pemeliharaan)	Penghapusan	Reklas ke Ektstrakomtabel	Reklas ke Perseidaan/ Pakai Habis	Jumlah Berkurang	
		65.148.179.609	1.122.878.000	-	-	-	1.122.878.000	-	45.979.500	-	70.288.000	116.267.500	66.154.020.109
A	TANAH	2.893.899.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.893.899.822
B	PERALATAN DAN MESIN	25.334.744.317	1.122.878.000	-	-	-	1.122.878.000	-	45.979.500	770.000	70.288.000	117.037.500	26.340.584.817
C	GEDUNG DAN BANGUNAN	9.648.229.414											9.648.229.414
D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	27.236.439.556	-										27.236.439.556
E	ASET TETAP LAINNYA	66.500	-				-						66.500
F	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	34.800.000	-				-						34.800.000
												Jumlah	66.154.020.109

Jumlah aset tetap TA. 2023 sebesar Rp. 66.154.020.109,- merupakan hasil mutasi dari belanja modal tahun 2023 (Neraca Awal) sampai dengan 2023 (Tahun Berjalan). Yang disajikan di Neraca adalah hasil dari jumlah Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar **Rp26.512.375.423,73** sehingga saldo akhir aset tetap sesuai dengan Neraca sejumlah **Rp39.641.644.685,27,-**.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 3.1.5.7.1 Tanah.

Aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.893.899.822,-. Adapun rincian aset Tanah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Tanah alas bangunan Kantor Belakang 4.800 m2 Rp 720.000.000
2. Tanah alas bangunan Kantor Depan 1.300 m2 Rp 195.000.000
3. Tanah alas bangunan Terminal Kerkop 3.548 m2 Rp 709.600.000
4. Tanah alas bangunan Terminal Kranggan 1.700 m2 Rp 350.000.000
5. Tanah alas bangunan Terminal Ngaren 2.000 m2 Rp 185.793.057
6. Tanah bekas bengkok 543 m2 Rp 67.800.000
7. Tanah alas bangunan 2.532 m2 Rp 59.700.000
8. Tanah Sub Terminal Maron 1.755 m2 Rp 606.006.765

#### 3.1.5.7.2 Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2023 sebesar Rp25.334.744.317,-. Pada tahun 2023 terdapat belanja modal yang menambah aset sebesar Rp1.122.878.000,- yang terdiri dari:

## BELANJA MODAL 2023

<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
Mesin bor (1)	720.000	belanja modal
Tiang PJU (5)	28.500.000	belanja modal
Topi (6)	1.500.000	belanja modal
Sepatu (6)	5.000.000	belanja modal
Flasher (1)	49.250.500	belanja modal
Rambu RPPJ (14)	16.999.500	belanja modal
Cermin tikungan (2)	10.000.000	belanja modal
Guardrail	114.550.000	belanja modal
LPJU (54)	860.300.000	belanja modal
Tiang PJU (4)	21.000.000	belanja modal
Modul LED	7.788.000	belanja modal
Filter CO-HC	6.500.000	belanja modal
Gerinda (2)	770.000	belanja modal
<b>JUMLAH</b>	<b>1.122.878.000</b>	

Adapun dari rincian belanja modal tersebut terdapat beberapa barang yang reklas menjadi barang persediaan berupa:

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH HARGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Filter CO-HC	6.500.000	Persediaan kertas dan cover
2	Modul LED	7.788.000	Persediaan alat listrik
3	Sepatu (6)	5.000.000	Persediaan perlengkapan dinas
4	Topi (6)	1.500.000	Persediaan perlengkapan dinas
5	Tiang PJU (5)	28.500.000	Persediaan bahan bangunan dan konstruksi
6	Tiang PJU (4)	21.000.000	Persediaan bahan bangunan dan konstruksi
	<b>Jumlah</b>	<b>70.288.000</b>	

Adapun dari rincian belanja modal tersebut terdapat beberapa barang yang reklas menjadi barang ekstrakomptabel berupa:

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH HARGA</b>
1	Gerinda (2)	770.000
	<b>Jumlah</b>	<b>770.000</b>

Pada tahun berjalan peralatan dan mesin mengalami penghapusan sebesar:

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH HARGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	HONDA/WIN MCB/Sepeda Motor	9.026.000	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kendaraan
2	Suzuki Thunder/EN 125 A/-	14.354.250	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kendaraan
3	Suzuki Thunder/EN 125 A/-	14.354.250	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kendaraan
4	Honda/MCB/-	8.245.000	Penghapusan Peralatan dan Mesin Kendaraan
	<b>Jumlah</b>	<b>45.979.500</b>	

Adapun rincian aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.340.584.817,- sebagai berikut:

1. alat besar	Rp	1.376.263.625
2. alat angkutan	Rp	4.133.901.747
3. alat bengkel dan alat ukur	Rp	1.617.006.700
4. alat kantor dan rumah tangga	Rp	629.156.100
5. alat studio, komunikasi, dan pemancar	Rp	376.631.900
6. alat kedokteran dan kesehatan	Rp	2.033.500
7. alat laboratorium	Rp	2.327.650.500
8. komputer	Rp	537.370.730
9. alat keselamatan kerja	Rp	82.783.500
10. rambu – rambu	Rp	15.257.786.515

#### 3.1.5.7.3 Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Perhubungan per 1 Januari 2023 adalah **Rp9.648.229.414,-** dan tidak ada penambahan sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun rincian aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.648.229.414,- sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung	Rp	8.636.807.840
2. Tugu titik kontrol/pasti	Rp	1.011.421.574

#### 3.1.5.7.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada neraca awal 2023, aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp27.236.439.556,-** dan tidak ada penambahan sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Jalan dan Jembatan	Rp	1.531.915.125
2. Bangunan air	Rp	655.510.329
3. Instalasi	Rp	3.827.451.765
4. Jaringan	Rp	21.221.562.337

#### 3.1.5.7.5 Aset Tetap Lainnya

Pada neraca awal 2023, aset tetap lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp66.500,-** dan tidak ada penambahan sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun rincian aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahan Perpustakaan	Rp	66.500
-----------------------	----	--------

#### 3.1.5.7.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada neraca awal 2023, Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp34.800.000,-** dan tidak ada penambahan sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	34.800.000
--------------------------------	----	------------

### 3.1.5.8 Aset Lainnya

Pada neraca awal 2023, aset lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp578.917.716,-**

Adapun rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Aset Tidak Berwujud	Rp	117.876.900
2. Aset Lain-lain	Rp	461.040.816

Terdapat akumulasi penyusutan sejumlah **Rp564.183.103,50**. Maka sesuai dengan neraca akhir, jumlah Aset lainnya menjadi **Rp14.734.612,50** setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

### 3.1.5.9 Barang Ekstrakomptabel

Barang ekstrakomptabel yang tercatat pada Laporan Mutasi Aset Dinas Perhubungan di awal tahun 2023 sebesar **Rp109.904.966,-**. Pada tahun berjalan mengalami penambahan aset reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
1	Gerinda (2)	770.000
	<b>Jumlah</b>	<b>770.000</b>

Jumlah barang ekstrakomptabel setelah adanya reklas dari peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel sebesar Rp 110.674.966,-.

### 3.1.6 Kewajiban

#### 3.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp1.488.861.880,-** yang terdiri dari:

##### 1. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar **Rp226.995.379,-**

- Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2022 yang menjadi pendapatan LO tahun 2023 sebesar Rp192.232.083,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp188.462.083,- dan Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi ijin Trayek sebesar Rp3.770.000,-

- Menurut Berita Acara Nomor 5/900/I/2023 pada 23 Januari 2023 terdapat pelimpahan pendapatan di muka atas retribusi izin trayek dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebesar Rp27.530.252,-. Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2022 yang menjadi pendapatan LO tahun 2023 karena adanya pelimpahan pendapatan di muka atas retribusi izin trayek dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebesar Rp11.055.231,-
  - Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2023 sebesar Rp197.346.500,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2023 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp192.656.500,- dan Pendapatan di Muka tahun 2023 Retribusi izin trayek kartu pengawasan sebesar Rp4.690.000,-
  - Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2023 sebesar Rp29.648.879,- atas pendapatan di muka surat keterangan retribusi izin trayek tahun 2023 sebesar Rp13.173.858,- serta pendapatan di muka surat keterangan retribusi izin trayek tahun 2018-2022 sebesar Rp16.475.021,-.
2. Utang Belanja sebesar Rp 1.261.866.501,- yang terdiri dari:
- a. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 220.138.001,-
    - Utang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 141.375.251,-
    - Utang Tambahan Penghasilan PLT Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 820.000,-
    - Utang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp. 77.942.750,-
  - b. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.041.728.500,-
    - Utang Honor Pegawai Tidak Tetap bulan Desember 2023 sebesar Rp.102.350.000,-
    - Utang Belanja Jasa Kantor Telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp. 73.488,-
    - Utang Belanja air Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 282.200,-
    - Utang Belanja Listrik Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 715.888,-
    - Utang Belanja Internet Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 3.130.650,-
    - Utang Belanja Penerangan Jalan Umum Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 934.712.974,-
    - Utang Belanja air Terminal Ngadirejo Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 463.300,-



### 3.1.6.2 Kewajiban Jangka Panjang

Nihil

### 3.1.7 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban yaitu sebesar **Rp38.868.433.015,77**.

Terdapat koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
1	Mencatat pelimpahan PDM atas retribusi izin trayek	(Rp 27.530.252)
	JUMLAH	(Rp 27.530.252)

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD sebagai berikut :

- Reklas aset ke persediaan dari peralatan dan mesin berupa filter CO-HC ke persediaan kertas dan cover senilai Rp6.500.000,-
- Reklas aset ke persediaan dari peralatan dan mesin berupa modul LED ke persediaan alat listrik senilai Rp7.788.000,-
- Reklas aset ke persediaan dari peralatan dan mesin berupa sepatu lapangan ke persediaan perlengkapan dinas senilai Rp5.000.000,-
- Reklas aset ke persediaan dari peralatan dan mesin berupa topi kerja ke persediaan perlengkapan dinas senilai Rp1.500.000,-
- Reklas aset ke persediaan dari peralatan dan mesin berupa tiang PJU ke persediaan bahan bangunan dan konstruksi senilai Rp28.500.000,-
- Reklas aset ke persediaan dari peralatan dan mesin berupa tiang PJU ke persediaan bahan bangunan dan konstruksi senilai Rp21.000.000,-
- Reklas aset peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel senilai Rp770.000,-
- Penghapusan aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp45.979.500,-

- Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2022 yang menjadi pendapatan LO tahun 2023 sebesar Rp192.232.083,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp188.462.083,- dan Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi ijin Trayek sebesar Rp3.770.000,-
- Menurut Berita Acara Nomor 5/900/I/2023 pada 23 Januari 2023 terdapat pelimpahan pendapatan di muka atas retribusi izin trayek dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebesar Rp27.530.252,-. Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2022 yang menjadi pendapatan LO tahun 2023 karena adanya pelimpahan pendapatan di muka atas retribusi izin trayek dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebesar Rp11.055.231,-
- Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2023 sebesar Rp.197.346.500,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2023 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 192.656.500,- dan Pendapatan di Muka tahun 2023 Retribusi izin trayek kartu pengawasan sebesar Rp4.690.000,-
- Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2023 atas pendapatan di muka surat keterangan retribusi izin trayek sebesar Rp13.173.858,-

**BAB IV**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2021. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Perhubungan;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan PJU;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>		<b>JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>KET</b>
1	2		3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:				
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	7	
	b.	SMP	2	
	c.	SMA	17	
	d.	Diploma I-III	14	
	f.	S-1 dan D-IV	7	
	g.	S-2	3	

<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a.	Gol I	5
	b.	Gol II	24
	c.	Gol III	18
	d.	Gol IV	3
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	
3	Jabatan		
	a.	Eselon II	1
	b.	Eselon III	3
	c.	Eselon IV	5
	d.	Eselon V	-
	e.	Jabatan Fungsional Khusus	6
	f.	Jabatan Fungsional Umum	35
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di dominasi dari lulusan SMA dengan kepangkatan golongan II.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disajikan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berupa laporan keuangan Tahun 2023.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



**SUPRIYANTO, AP., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001